



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7239-7254

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali

Adinda Nur Cintya Wati^{1✉}, I Nyoman Mahaendra Yasa²

Universitas Udayana

Email: adindanurcw29@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan, yang mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun begitu, terdapat ketidakmerataan karena beberapa kabupaten masih mencatatkan IPM di bawah rata-rata Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa disparitas masih ada di antara kabupaten dan kota tersebut. Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan juga mencerminkan disparitas yang signifikan. Tujuan dibuat riset ini adalah untuk mengidentifikasi variabel yang dapat memengaruhi disparitas distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan variabel eksogen adalah tingkat pendidikan, belanja modal dan juga investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang diambil sebagai bahan riset adalah data sekunder dengan teknik observasi non perilaku dalam mengumpulkan data dan kemudian dianalisis dengan analisis jalur. Menurut analisis, ditemukan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi negatif signifikan, sedangkan belanja modal dan investasi berkorelasi negatif tanpa ketidaksignifikan dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Bali. Tingkat pendidikan, belanja modal dan investasi berkorelasi positif signifikan, sedangkan disparitas distribusi pendapatan berkorelasi negatif signifikan dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan berkorelasi tidak langsung, sedangkan belanja modal dan investasi tidak berkorelasi tidak langsung dengan kesejahteraan masyarakat dengan cara melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Upaya yang dapat diberlakukan adalah dengan memperhatikan kualitas pembangunan manusia sebagai tujuan dari pembangunan dengan memperhatikan tingkat pendidikan, belanja modal dan investasi di setiap daerah agar dapat meningkat dan dialokasikan secara tepat.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Masyarakat, Disparitas Distribusi Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Belanja Modal dan Investasi.*

Abstract

Districts/cities in Bali Province show significant Human Development Index (HDI) accomplishments, which reflect their people's welfare. However, there is inequality because several districts still record HDI below the Bali Province average. This shows that disparities still exist between these districts and cities. Apart from that, inequality in income distribution also reflects significant disparities. This research purposes identify factors that may could affect disparities in income distribution and public welfare with exogenous variables namely level of education, capital expenditure and also district/city investment in Bali Province. The data taken as research material is secondary data using non-behavioral observation techniques in collecting data and then analyzed using path analysis. In line with analysis, it was discovered that the level of education was significantly negatively correlated, while capital expenditure and investment were negatively correlated without being insignificant with disparities in district/city income distribution in the province of Bali. The level of education, capital expenditure and investment are significantly positively correlated, while disparities in income distribution are significantly negatively correlated with the welfare of district/city public in Bali Province. The level of education is indirectly correlated, while capital expenditure and investment are not indirectly correlated with public welfare through disparities in district/city income distribution in Bali Province. Efforts that can be enacted are to take notice to the quality of human advancement as the goal of development by paying attention to the level of education, capital expenditure and investment in each region so that they can increase and be allocated appropriately.

Keywords: *Public Welfare, Disparities in Income Distribution, Level of Education, Capital Expenditure and Investment.*

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan manusia merupakan suatu pendekatan baru dalam memahami pembangunan yang di dalamnya manusia terlibat sebagai agen pembangunan ekonomi. Perubahan-perubahan ini mengembangkan kualitas manusia dan menjadikan manusia sebagai aset bagi pembangunan ekonomi yang bertujuan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu parameter yang telah diterbitkan *United National Development Programme* (UNDP) guna mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia dalam suatu daerah.

Kabupaten/kota di Provinsi Bali memperoleh derajat pencapaian IPM yang tinggi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun secara keseluruhan skor IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali selalu meraih peningkatan secara konsisten, namun sejumlah kabupaten memiliki skor IPM lebih rendah dari Provinsi Bali. Salah satu kabupaten/kota di Bali dengan IPM tertinggi dan terus berkembang dari tahun ke tahun

adalah Kota Denpasar. Dalam hal ini dapat dijadikan pembandingan dengan kabupaten lainnya.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali
Tahun 2018-2022 (poin)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jembrana	71,65	72,35	72,36	72,75	73,58
2.	Tabanan	75,45	76,16	76,17	76,45	76,75
3.	Badung	80,87	81,59	81,60	81,83	82,13
4.	Gianyar	76,61	77,14	77,36	77,70	78,39
5.	Klungkung	70,90	71,71	71,73	71,75	72,55
6.	Bangli	68,96	69,35	69,36	69,37	70,26
7.	Karangasem	66,49	67,34	67,35	67,36	68,28
8.	Buleleng	71,70	72,30	72,55	72,56	73,45
9.	Denpasar	83,30	83,68	83,93	84,03	84,37
	Provinsi Bali	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Menurut Tabel 1, IPM yang ada di kabupaten/kota Provinsi Bali terus memperoleh peningkatan setiap tahunnya di setiap daerah. Kendati demikian, dari data tersebut menunjukkan bahwa Kota Denpasar menyandang IPM tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Selanjutnya, disusul oleh Kabupaten Badung. Di sisi lain, IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Karangasem. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peningkatan IPM Provinsi Bali tidak dibarengi dengan pemerataan antar daerahnya sehingga menyebabkan ada daerah yang terbelakang karena kualitas sumber daya manusianya (SDM) rendah dan ada daerah yang berkembang karena kualitas SDM-nya tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada daerah yang pembangunannya tertinggal di belakang. Tentu saja, dengan adanya persoalan ini dapat menyebabkan disparitas dalam kualitas SDM di daerah yang kemudian berimbas pada disparitas pendapatan.

Disparitas pendapatan mengarah pada distribusi pendapatan yang tidak merata antar individu maupun golongan masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Peningkatan disparitas pendapatan juga akan meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Hal ini akhirnya akan memperparah kesenjangan antara golongan dengan penghasilan tinggi dan rendah. Disparitas tidak selalu muncul di kota-kota besar. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang mengalami disparitas distribusi pendapatan. Provinsi Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata yang populer dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di beberapa sektor, terutama pariwisata. Namun, dalam keadaan tersebut, terdapat

disparitas distribusi pendapatan yang signifikan antara mereka yang terlibat dalam industri pariwisata dan mereka yang tidak.

Dalam menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan, digunakan indikator yang disebut rasio gini. Rasio gini ini menggunakan skala 0 hingga 1 (Todaro, 2004: 226). Semakin meningkatnya rasio gini mengindikasikan semakin besar ketimpangan. Hal ini berarti kesenjangan ekonomi antar kelompok di daerah tersebut semakin melebar.

Tabel 2. Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (poin)

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jembrana	0,3272	0,2903	0,3531	0,3170	0,3260
2.	Tabanan	0,3249	0,3080	0,3239	0,3110	0,2990
3.	Badung	0,3392	0,3244	0,3167	0,3320	0,3160
4.	Gianyar	0,3050	0,2866	0,3171	0,3330	0,3070
5.	Klungkung	0,3915	0,3847	0,3575	0,3460	0,3510
6.	Bangli	0,3126	0,2744	0,2829	0,2850	0,2880
7.	Karangasem	0,3393	0,3125	0,3268	0,3180	0,2970
8.	Buleleng	0,3446	0,2847	0,2851	0,2820	0,2810
9.	Kota Denpasar	0,2422	0,3473	0,3301	0,3750	0,3680
	Provinsi Bali	0,3774	0,3662	0,3690	0,3780	0,3630

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2023

Terlihat dari Tabel 2, rasio gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2018-2022 berfluktuasi dan juga antar daerah nya terdapat kesenjangan nilai rasio gininya. Rasio gini paling tinggi dari tahun 2018-2022 terdapat di Kabupaten Klungkung sedangkan rasio gini paling rendah dari tahun 2018-2022 terdapat di Kabupaten Bangli. Dalam hal ini, pekerja di sektor pariwisata cenderung mendapatkan pendapatan yang melebihi sektor lain, sementara orang-orang yang bekerja di sektor lain yang tidak terlalu terlibat dalam industri pariwisata dapat mengalami kesenjangan pendapatan yang besar. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi di antara penduduk setempat.

Di Provinsi Bali, perbedaan dalam belanja modal dan investasi di berbagai sektor serta anggaran tingkat pendidikan dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, sektor pariwisata mungkin mendapatkan investasi lebih besar daripada sektor lainnya yang dapat menghasilkan perbedaan pendapatan yang signifikan antara mereka yang terlibat dalam sektor pariwisata dan mereka yang tidak. Secara teori, pembangunan ekonomi berpotensi mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi yang disasar dengan tepat dapat meningkatkan standar hidup masyarakat sampai akhirnya akan menghasilkan

kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki pendapatan rendah, sehingga mengurangi disparitas antara penduduk yang berpendapatan rendah dan tinggi.

Disparitas distribusi pendapatan ini ada karena dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terhubung. Di berbagai penelitian dikemukakan bahwa pendidikan menjadi faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam memperbesar atau memperkecil kesenjangan distribusi pendapatan. Kesenjangan pendidikan yang minim kemungkinan besar akan menyebabkan rendahnya disparitas distribusi pendapatan dan sebaliknya. Apabila terdapat kesenjangan pendidikan yang besar, maka ketimpangan pendapatan juga akan besar. (Lin, 2007). Daerah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas tinggi atau tidak menyediakan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat dapat mengalami ketimpangan yang lebih besar. Pendidikan yang kurang dapat membatasi peluang ekonomi yang tersedia bagi individu-individu tersebut.

Selanjutnya, belanja modal dan investasi juga berperan penting. Jika investasi lebih condong ke sektor-sektor tertentu atau daerah-daerah tertentu yang tidak merata, hal ini dapat memperbesar kesenjangan antara masyarakat yang mendiami daerah yang berkembang pesat dan masyarakat yang mendiami daerah yang tertinggal. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian Yanthi & Sutrisna (2021) yang mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah disebabkan oleh keterbelakangan dalam pembangunan manusia, ketidakmerataan investasi, dan tingginya pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, tingkat pendidikan yang berkualitas memberikan landasan yang adil bagi semua individu untuk memperoleh ilmu dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja yang nantinya membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dengan meningkatkan kesempatan bagi semua orang. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, masyarakat berpotensi memiliki keterampilan yang lebih baik yang bisa berujung pada peningkatan status pekerjaan dan peningkatan gaji sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan dicapai. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Shahpari dan Davoudi (2013) yang mengemukakan bahwa penambahan modal manusia dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam jangka waktu panjang. Maka dari itu, jika pendidikan di suatu daerah mengalami ketimpangan, maka disparitas distribusi pendapatannya diperkirakan akan tinggi juga yang kemudian akan mempengaruhi kesejahteraan yang diterima.

Aspek berikutnya yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah belanja modal yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun sebuah prasarana. Ketersediaan prasarana di setiap sektor merupakan aspek penting dalam pembangunan

ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dengan kualitas IPM yang semakin baik dan pemerataan pendapatan. Belanja modal memegang peran yang besar dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan antar masyarakat serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur alokasi dana pada sektor prasarana dengan akurat dan cermat karena ketersediaan prasarana merupakan pendorong penting dalam aktivitas ekonomi (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

Belanja modal yang terfokus pada sektor tertentu dapat memperbesar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Di sisi lain, belanja modal pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan mengarahkan belanja modal secara tepat dan merata, pemerintah dan pemangku kepentingan bisa memperkuat fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pernyataan tersebut didasarkan pada temuan studi yang menyimpulkan bahwa infrastruktur yang ada dikarenakan pengeluaran pemerintah yakni belanja modal menyumbang dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) (Zakaria, 2018). Ketika belanja modal seperti infrastruktur meningkat, maka IPM juga akan meningkat. Jika IPM meningkat, maka akan berimbas terhadap aspek penting masyarakat seperti produktifitas, pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang akan diterima.

Dan tak kalah penting, investasi adalah aspek yang sangat penting dalam penurunan ketimpangan distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya aktivitas investasi di suatu daerah dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan pada ujungnya menurunkan kesenjangan distribusi pendapatan (Awandari dan Indrajaya, 2016). Dengan adanya investasi yang beragam membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal yang dapat memperkecil risiko ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, investasi yang tepat dalam kesehatan, pendidikan, dan sumber daya manusia secara keseluruhan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Sebabnya, investasi berpotensi menjadi pondasi bagi keberhasilan dan pembangunan berkelanjutan di masa depan dikarenakan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Riset yang dilaksanakan memanfaatkan pendekatan kuantitatif dengan analisis kausal asosiatif. Kabupaten/kota di Provinsi Bali dipilih menjadi lokasi riset dengan pertimbangan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung lebih rendah di beberapa kabupaten bila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Bali secara keseluruhan. Sebaran IPM di Provinsi Bali juga ditemukan belum merata, dan terdapat beberapa daerah yang dapat dikatakan masih kurang dalam hal kesejahteraannya. Selain itu, ada ketimpangan sedang di Provinsi Bali karena perbedaan pendapatan antar kota dan kabupaten. Objek pada riset ini difokuskan pada lima variabel, yaitu tingkat pendidikan, belanja modal, dan investasi sebagai variabel eksogen, kesejahteraan masyarakat sebagai variabel endogen, dan disparitas distribusi pendapatan sebagai variabel intervening. Riset ini memakai data panel dengan jumlah pengamatan sebanyak $9 \times 10 = 90$ pengamatan dari tahun 2013 hingga 2022. Data kuantitatif dan kualitatif dimanfaatkan sebagai jenis data riset ini. Data yang dipakai berasal dari sumber sekunder. Pendekatan pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi non-perilaku. Teknik pengolahan data yang diimplementasikan meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis jalur dengan mengoperasikan *software* Eviews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengidentifikasi arah dan signifikansi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, analisis regresi data panel digunakan sebagai pendekatan.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Tingkat Pendidikan (X1)	Belanja Modal (X2)	Investasi (X3)	Disparitas Distribusi Pendapatan (Y1)	Kesejahteraan Masyarakat (Y2)
Satuan	Tahun	Juta Rupiah	Juta Rupiah	Poin	Poin
Mean	8,19	263,936	1,634	0,3317	73,44
Maximum	11,50	1.241,111	15.728,798	0,4026	84,37
Minimum	5,34	57,141	3,124	0,2682	63,70
Std. Dev	1,62	231,816	2,586	0,0313	55,41

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Pada variabel (X1) yaitu tingkat pendidikan memperlihatkan nilai maksimum terjadi pada Kota Denpasar di tahun 2022 (11,50 tahun) hingga nilai minimum pada Kabupaten Karangasem di tahun 2013 (5,34 tahun), terdapat variasi yang cukup signifikan. Dengan nilai mean sejumlah 8,19 tahun dan standar deviasi sejumlah 1,62, kita bisa melihat bahwa nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan

bahwa tingkat pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2013-2022 cenderung merata, meskipun terdapat variasi antara daerah-daerahnya.

Pada variabel (X2) yaitu belanja modal memperlihatkan nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Badung di tahun 2017 sejumlah 1.241,111 miliar rupiah, hingga nilai minimum terjadi pada Kabupaten Bangli di tahun 2020 sejumlah 57,141 juta rupiah dengan nilai standar deviasi sejumlah 231,618 juta rupiah. Nilai mean sejumlah 263,936 juta rupiah yang memperlihatkan bahwa nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2013-2022 dapat dikatakan sudah merata.

Pada variabel (X3) yaitu investasi memperlihatkan nilai maksimum terjadi pada Kota Denpasar di tahun 2019 sejumlah 15.728,798 miliar rupiah, hingga nilai minimum terjadi pada Kabupaten Bangli di tahun 2019 sejumlah 3,124 juta rupiah, dengan nilai standar deviasi sejumlah 2,586 juta rupiah. Nilai mean sejumlah 1,634 juta rupiah yang memperlihatkan bahwa nilai rata-ratanya lebih kecil dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa investasi kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2013-2022 dapat dikatakan belum merata secara maksimal.

Pada variabel (Y1) yaitu disparitas distribusi pendapatan memperlihatkan nilai maksimum terjadi pada Kabupaten Tabanan di tahun 2014 sejumlah 0,4026 poin, hingga nilai minimum terjadi pada Kabupaten Gianyar di tahun 2017 sejumlah 0,2682 poin, dengan nilai standar deviasi sejumlah 0,0313. Nilai mean sejumlah 0,3317 yang memperlihatkan bahwa nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa disparitas pada distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2013-2022 dapat dikatakan merata.

Pada variabel (Y2) yaitu kesejahteraan masyarakat memperlihatkan nilai maksimum terjadi pada Kota Denpasar di tahun 2022 sejumlah 84,37 poin, hingga nilai minimum terjadi pada Kabupaten Karangasem di tahun 2013 sejumlah 63,70, dengan nilai standar deviasi sejumlah 55,40 poin. Nilai mean sejumlah 73,44 yang memperlihatkan bahwa nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan standar deviasi. Dari sini, dapat diinterpretasikan bahwa kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2013-2022 dapat dikatakan merata.

Hasil riset menunjukkan adanya korelasi di antara variabel-variabel yang memiliki koefisien jalur dalam riset ini. Teknik analisis jalur (*path analysis*) digunakan sebagai pengujian data riset. Sebelum menyusun persamaan struktural yang digunakan, langkah pertama adalah mengolah dan menghitung data yang diperoleh menggunakan *software* E-views 12 sehingga tercermin hasil analisis berikut.

Tabel 4. Hasil *Path Analysis* (Struktur I)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.579875	0.049638	11.68204	0.0000
Tingkat Pendidikan	-0.029315	0.005987	-4.896679	0.0000
Belanja Modal	-2.258610	1.873563	-1.205516	0.2316
Investasi	-1.304841	1.199268	-1.088032	0.2799

a. Dependent Variable: Disparitas Distribusi Pendapatan

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program Eviews 12 tingkat pendidikan memperoleh nilai *standardized coefficient beta* dengan nilai yang mencapai -0,029 dan juga nilai probabilitas yang mencapai $0,000 \leq 0,05$ mengidentifikasi bahwa tingkat pendidikan secara signifikan berkorelasi negatif dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal dengan nilai *standardized coefficient beta* mencapai -2,259 dan juga nilai probabilitas yang mencapai $0,232 > 0,05$ mengidentifikasi bahwa belanja modal secara tidak signifikan berkorelasi negatif dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi memiliki nilai *standardized coefficient beta* mencapai -1,305 dengan nilai probabilitas yang mencapai $0,280 > 0,05$ mengidentifikasi bahwa investasi secara tidak signifikan berkorelasi negatif dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel 5. Hasil *Path Analysis* (Struktur II)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	48.73302	1.128428	43.18663	0.0000
Tingkat Pendidikan	3.281468	0.063689	51.52353	0.0000
Belanja Modal	0.002236	0.000566	3.952187	0.0002
Investasi	0.000961	0.000408	2.357687	0.0207
Disparitas Distribusi Pendapatan	8.684587	3.189784	-2.722625	0.0079

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program E-views 12 tingkat pendidikan memperoleh nilai *standardized coefficient beta* dengan nilai yang mencapai 3,281 dan juga probabilitasnya mencapai $0,000 \leq 0,05$ mengidentifikasi bahwa tingkat pendidikan secara signifikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Belanja modal memperoleh nilai *standardized coefficient beta* mencapai 0,002 dan juga probabilitas mencapai $0,000 \leq 0,05$ mengidentifikasi bahwa belanja modal secara signifikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi memperoleh nilai *standardized coefficient beta* mencapai 0,001 dan juga nilai probabilitas mencapai $0,021 \leq$

0,05 mengidentifikasi bahwa investasi secara signifikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Disparitas Distribusi Pendapatan memperoleh nilai *standardized coefficient beta* mencapai -8,685 dan juga nilai probabilitas mencapai $0,008 \leq 0,05$ mengidentifikasi bahwa disparitas distribusi pendapatan secara signifikan berkorelasi negatif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Persamaan Struktur I : $Y_1 = -0,029X_1 - 2,259X_2 - 1,305X_3$

Persamaan Struktur II : $Y_2 = 3,281X_1 + 0,002X_2 + 0,001X_3 - 8,685Y_1$

Keterangan:

X_1 = Tingkat Pendidikan

X_2 = Belanja Modal

X_3 = Investasi

Y_1 = Disparitas Distribusi Pendapatan

Y_2 = Kesejahteraan Masyarakat

Dengan merujuk Tabel 4 dan 5, adapun ringkasan koefisien jalurnya dikompilasi sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Koefisien Jalur

Hubungan antar Variabel	Koefisien	P-value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	-0,029	0,000	Negatif dan Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	-2,259	0,232	Negatif dan Tidak Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_1$	-1,305	0,280	Negatif dan Tidak signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	3,281	0,000	Positif dan Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,002	0,000	Positif dan Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_2$	0,001	0,021	Positif dan Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-8,685	0,008	Negatif dan Signifikan

Keterangan:

X_1 = Tingkat Pendidikan

X_2 = Belanja Modal

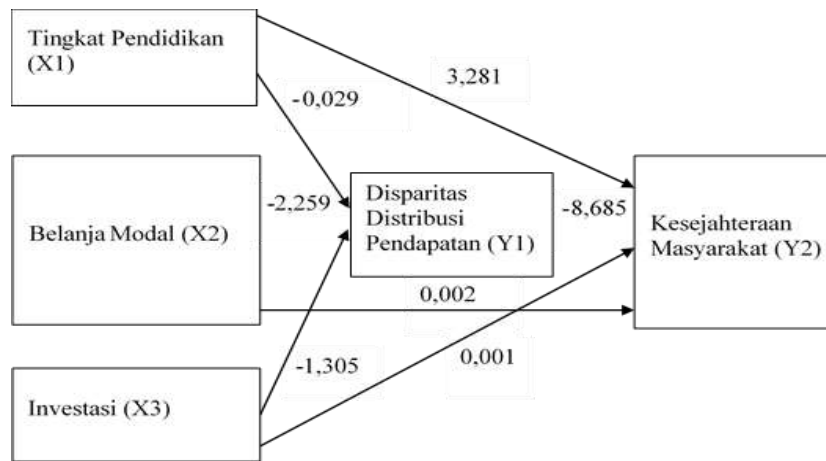
X_3 = Investasi

Y_1 = Disparitas Distribusi Pendapatan

Y_2 = Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: *Data Sekunder Diolah, 2023*

Mengacu pada analisis jalur yang telah diuraikan di atas, maka hasil koefisien jalur riset ini dapat dijelaskan sebagaimana yang dapat diamati dalam Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Analisis Jalur Determinan Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Berdasarkan uji yang dilakukan, diperoleh nilai pengaruh langsung, tidak langsung, dan total antar variabel sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Penelitian

Hubungan Antar Variabel	Langsung	Tidak Langsung	Total
$X_1 \rightarrow Y_1$	-0,029	-	-0,029
$X_2 \rightarrow Y_1$	-2,259	-	-2,259
$X_3 \rightarrow Y_1$	-1,305	-	-1,305
$X_1 \rightarrow Y_2$	3,281	$(-0,029 \times (-8,685))$	0,251
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,002	$(-2,259 \times (-8,685))$	19,619
$X_3 \rightarrow Y_2$	0,001	$(-1,305 \times (-8,685))$	11,333
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-8,685	-	-8,685

Keterangan:

X1 = Tingkat Pendidikan

X2 = Belanja Modal

X3 = Investasi

Y1 = Disparitas Distribusi Pendapatan

Y2 = Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2023

Tingkat pendidikan secara signifikan berkorelasi negatif dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan berikut mengindikasikan bahwa bila terjadi kenaikan pada tingkat pendidikan, maka disparitas distribusi pendapatan akan mengalami penurunan. Anggaran pendidikan dari tahun 2018-2022 di kabupaten/kota Provinsi Bali sesuai dengan amanat UUD.1945 yakni sekurang-kurangnya 20 persen. Dari temuan hasil riset ini dapat dikatakan bahwa anggaran pendidikan yang dikeluarkan

pemerintah cukup efektif membantu mengurangi disparitas pendapatan. Dengan memberikan akses yang lebih luas ke pendidikan, individu dari lapisan masyarakat yang kurang mampu memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan, yang pada akhirnya memberikan kesempatan luas kepada mereka guna meraih pekerjaan yang lebih tinggi. Dengan keterampilan yang relevan, seseorang dapat berperan aktif dalam sektor ekonomi yang berkembang, seperti sektor teknologi atau jasa profesional. Wahyuni dan Monika (2016) dalam risetnya telah menemukan hasil analisis bahwa tingkat pendidikan menyebabkan perubahan dalam menurunkan disparitas pendapatan.

Belanja modal berkorelasi negatif tanpa adanya ketidaksignifikanan dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan berikut menyiratkan bahwa sebesar apapun peningkatan belanja modal tidak akan memberikan dampak yang mendalam terhadap penurunan disparitas distribusi pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Sebabnya, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lebih terkonsentrasi di pusat ekonomi utama yakni di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dibandingkan kabupaten lainnya. Ketika pemerintah daerah meningkatkan belanja modal untuk proyek-proyek infrastruktur, harapannya adalah infrastruktur ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat setempat yang kemudian mendorong investor untuk berinvestasi. Dengan demikian, adanya investasi yang tinggi di suatu daerah jika tidak diimbangi dengan SDM masyarakat setempat yang unggul, ini tidak akan dapat mengurangi angka disparitas distribusi pendapatan. Analisa ini berbeda dengan studi sebelumnya, di mana Sutiono (2018) menyatakan belanja modal berkorelasi negatif signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan.

Investasi berkorelasi negatif tanpa adanya ketidaksignifikanan dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan berikut menyiratkan bahwa sebesar apapun peningkatan investasi tidak akan memberikan dampak yang mendalam terhadap penurunan disparitas distribusi pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Investasi yang tinggi sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal, melainkan membawa tenaga kerja dari luar daerah. Jika masyarakat sekitar tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang sesuai, mereka tidak dapat menikmati manfaat dari investasi tersebut. Dengan demikian, besarnya investasi di suatu daerah tidak mengakibatkan penurunan disparitas distribusi pendapatan. Analisa ini memberikan hasil yang serasi dengan riset Pradnyadewi & Purbadharmaja (2017) yang menyimpulkan bahwa investasi tidak berdampak besar terhadap disparitas distribusi

pendapatan. Sebab, dalam meraih angka disparitas yang kecil, baik pemerintah maupun swasta harus bekerja sama.

Tingkat pendidikan secara signifikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Temuan tersebut mencerminkan bahwa jika terdapat penambahan pada tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat juga akan semakin bertambah. Peluang untuk meraih pekerjaan yang lebih tinggi cenderung meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan seseorang dan ini akan berdampak pada pendapatan yang lebih tinggi. Sebagai hasilnya, dengan peningkatan pendidikan, seseorang dapat membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Dari hasil riset ini menunjukkan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah telah berhasil secara efektif dan optimal dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi sejumlah besar individu. Hal tersebut dapat membantu dalam mengoptimalkan kesejahteraan secara keseluruhan dengan memberikan keleluasaan dalam memperoleh kesempatan kepada individu untuk membangun kompetensi dan pemahaman yang esensial dalam mencapai kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Temuan riset ini didukung dengan studi Aini *et al* (2018) yang memberikan pernyataan bahwa antara tingkat pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat secara signifikan berkorelasi positif satu sama lain.

Belanja modal secara signifikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adanya temuan tersebut mencerminkan bahwa jika terdapat kenaikan belanja modal, kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Adanya pembangunan infrastruktur akan mendorong minat para investor, termasuk investor asing dan lokal untuk menanam modal dan membuka peluang kerja, karena pembangunan infrastruktur akan memberikan kemudahan mengakses fasilitas dan layanan publik, kemudian akan mengembangkan lapangan pekerjaan yang menyumbangkan pada peningkatan kesejahteraan. Temuan riset tersebut didukung studi Widiani dan Arka (2021) yang menunjukkan bahwa belanja modal secara langsung secara signifikan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Investasi secara signifikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adanya temuan tersebut mengindikasikan bahwa jika terdapat kenaikan investasi, kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin besar investasi yang dialokasikan di kabupaten/kota Provinsi Bali, tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya juga semakin besar. Hal tersebut ada karena investasi cenderung membuka kesempatan lapangan kerja baru. Dengan adanya tambahan lapangan kerja, pendapatan masyarakat lokal meningkat, yang

pada gilirannya meningkatkan taraf hidup mereka. Hasil ini didukung dengan studi Si'lang *et al* (2019) yang mendapatkan hasil bahwa investasi secara signifikansi berkorelasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Disparitas distribusi pendapatan secara signifikan berkorelasi negatif dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Semakin rendah angka disparitas pendapatan antara individu atau kelompok kabupaten/kota di Provinsi Bali, semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh masyarakatnya secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi di antara golongan masyarakat. Dengan distribusi pendapatan yang lebih adil, lebih banyak individu dapat mengakses sumber daya dan peluang yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ini dapat meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi lainnya, yang akhirnya memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Ini cocok dengan temuan dari studi Triwahyuningtyas *et al* (2019), yang menggambarkan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan berkorelasi negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara tidak langsung, tingkat pendidikan memengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui intervening disparitas distribusi pendapatan atau dengan kata lain, disparitas distribusi pendapatan bertindak sebagai variabel intervening antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sebaliknya, melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali, tidak ada korelasi tidak langsung dari belanja modal dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain disparitas distribusi pendapatan tidak berperan sebagai variabel intervening dari belanja modal dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Sejalan dengan temuan riset yang telah dijabarkan, implikasi dari riset ini adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan, Pemerintah Provinsi Bali harus memberikan perhatian khusus pada peningkatan anggaran pendidikan. Setiap daerah yang ada di Provinsi Bali perlu menargetkan kebijakan anggaran paling sedikit sejumlah 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD). Melalui pengalokasian anggaran yang optimal, diharapkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkat melalui pendidikan yang baik. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan belanja modal yang dikeluarkan pemerintah dan investasi di setiap daerah. Hal ini karena belanja modal dan investasi juga memainkan peran penting dalam pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya manusia, baik melalui infrastruktur pendukung maupun program-program yang mendukung pengembangan potensi sumber

daya manusia. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali perlu menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada peningkatan anggaran pendidikan, tetapi juga memperhatikan belanja modal dan investasi yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Dengan ini, diharapkan akan terjadi peningkatan secara keseluruhan dalam kualitas pengembangan SDM yang berkelanjutan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

SIMPULAN

Mengacu pada tinjauan sebelumnya, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi negatif signifikan, sedangkan belanja modal dan investasi berkorelasi negatif tanpa ketidaksignifikanan dengan disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Bali. Tingkat pendidikan, belanja modal dan investasi berkorelasi positif signifikan, sedangkan disparitas distribusi pendapatan berkorelasi negatif signifikan dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat pendidikan berkorelasi tidak langsung, sedangkan belanja modal dan investasi tidak berkorelasi tidak langsung dengan kesejahteraan masyarakat dengan cara melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Untuk mengurangi disparitas pada distribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan mutu pendidikan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Diharapkan pemerintah mengambil langkah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di setiap daerah, terutama dalam hal bagaimana anggaran pendidikan dibelanjakan. Berdasarkan perkembangan anggaran pendidikan kabupaten/kota di Bali, di beberapa kabupaten realisasi anggaran kurang dari 20 persen. Oleh karena itu, sebaiknya Pemprov Bali lebih memperhatikan anggaran pendidikan yang diperoleh dari APBD agar proporsinya cenderung meningkat dan dialokasikan secara tepat dan optimal.

Kota Denpasar dan Kabupaten Badung unggul dalam pembangunan infrastruktur dibanding kabupaten/kota lainnya. Saat ini, prioritas pemerintah haruslah fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dan kualitas masyarakat setempat guna memastikan bahwa setiap individu mendapatkan manfaat yang sama dari adanya pembangunan tersebut. Dengan meningkatkan infrastruktur di daerah yang tertinggal, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah di luar Kabupaten Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) dan pihak swasta perlu melakukan kerjasama untuk membuat peta investasi dan promosi

investasi sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap kabupaten agar sebaran investasi tidak hanya terfokus pada beberapa kabupaten. Selain itu, guna meningkatkan investasi pemerintah juga perlu mempersiapkan SDM lokal yang unggul yang nantinya akan memberikan *multiplier effect*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, E. N., Ifa Isnaini, Sri Sukamti & Lolita Noor Amalia. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal (TMJ)*, 3(1), hal. 2620 – 3383.
- Lin, Chun-hung A. (2007). Education Expansion, Educational Inequality and Income Inequality: Evidence From Taiwan,1976–2003. *Social Indicators Research*, 80(3), pp. 601–615.
- Pradnyadewi, Diah & Ida Bagus Putu Purbadharmaja. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastuktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6 (2), hal. 255-285.
- Shahpari, G., & Parviz Davoudi. (2014). Studying Effects of Human Capital on Income Inequality in Iran. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, pp. 1386–1389.
- Si'lang, Indrasuara Luther Sirangi, Zamruddin Hasid & Priyagus Priyagus. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Manajemen*, 11(2), hal. 159-169.
- Todaro, Michael P. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Triwahyuningtyas, Nunuk, Subur Subur & Sri Murtatik. (2019). Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Di Desa Margamulya Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 8 (2), hal.55-65
- Widiani, Luh Triska & Sudarsana Arka. (2021). Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10 (1), hal 182 – 215.
- Yanthi, Ni Putu Sri Puspita & I Ketut Sutrisna. (2021). Pengaruh IPM dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10 (5), hal. 2193 – 2222.